



MEMUTUS RANTAI KORUPSI POLITIK DAN KETIDAKPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

AGENDA PRIORITAS PEMBERANTASAN KORUPSI

Dadang Trisasonko
Sekretaris Jendral



Indonesia

With a score of 40, Indonesia improves by two points on the CPI. A promising emerging economy is coupled with repression of civil society and weak oversight institutions. The independence and effectiveness of Indonesia's anti-corruption

commission, the KPK, is currently being thwarted by the government.

The Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), is seen as a symbol of progress and modernisation, but is undergoing a loss of autonomy and power. Paradoxically, this contradicts

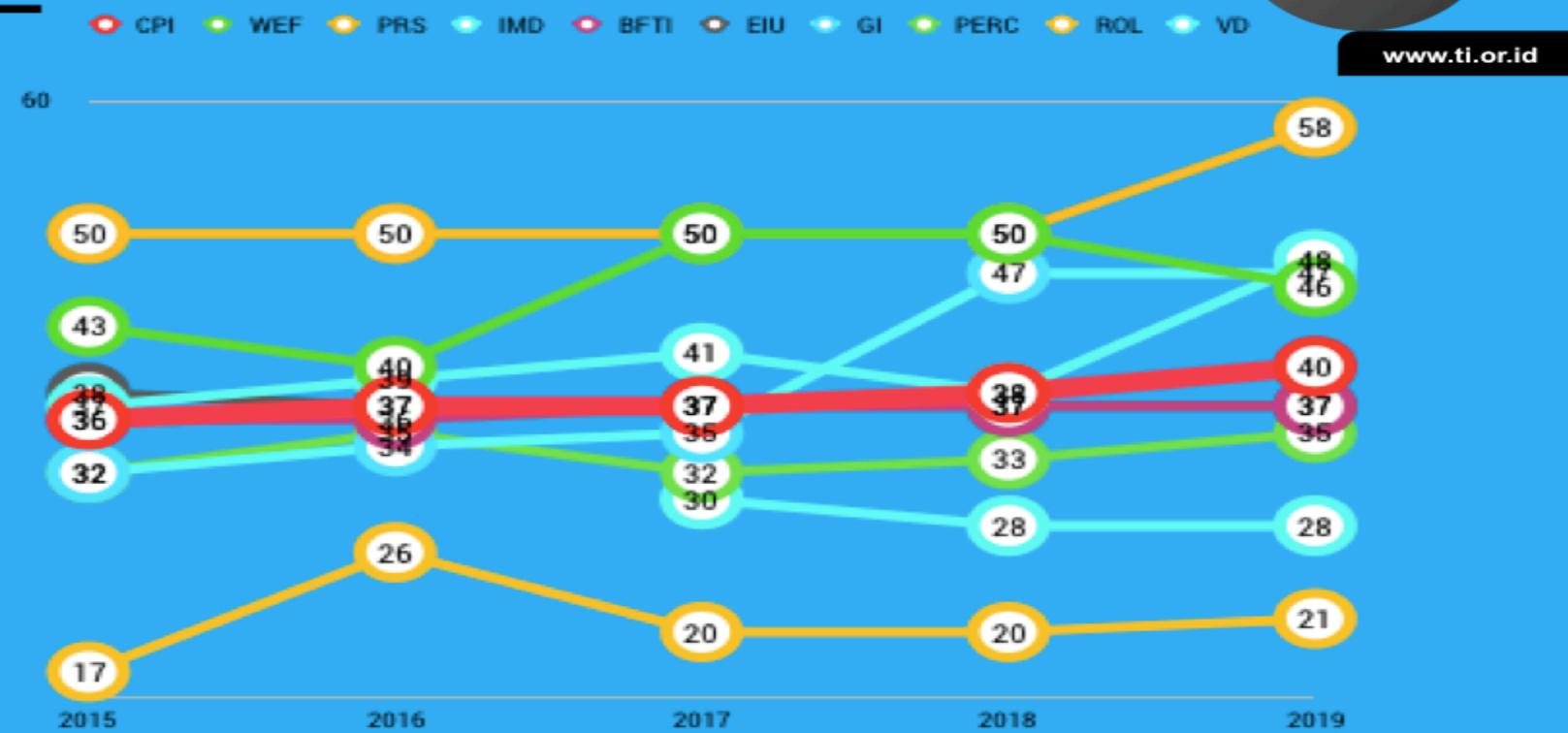
the government's aspirations and President Widodo's own agenda, which prioritises foreign investment and a booming economy. With corruption issues in the limelight, Indonesia risks scaring off investors and slowing economic progress.



The re-election of President Joko Widodo was a setback to political integrity that surprised many, undercutting the impressive democratic and anti-corruption resurgence the country experienced in the last few years.

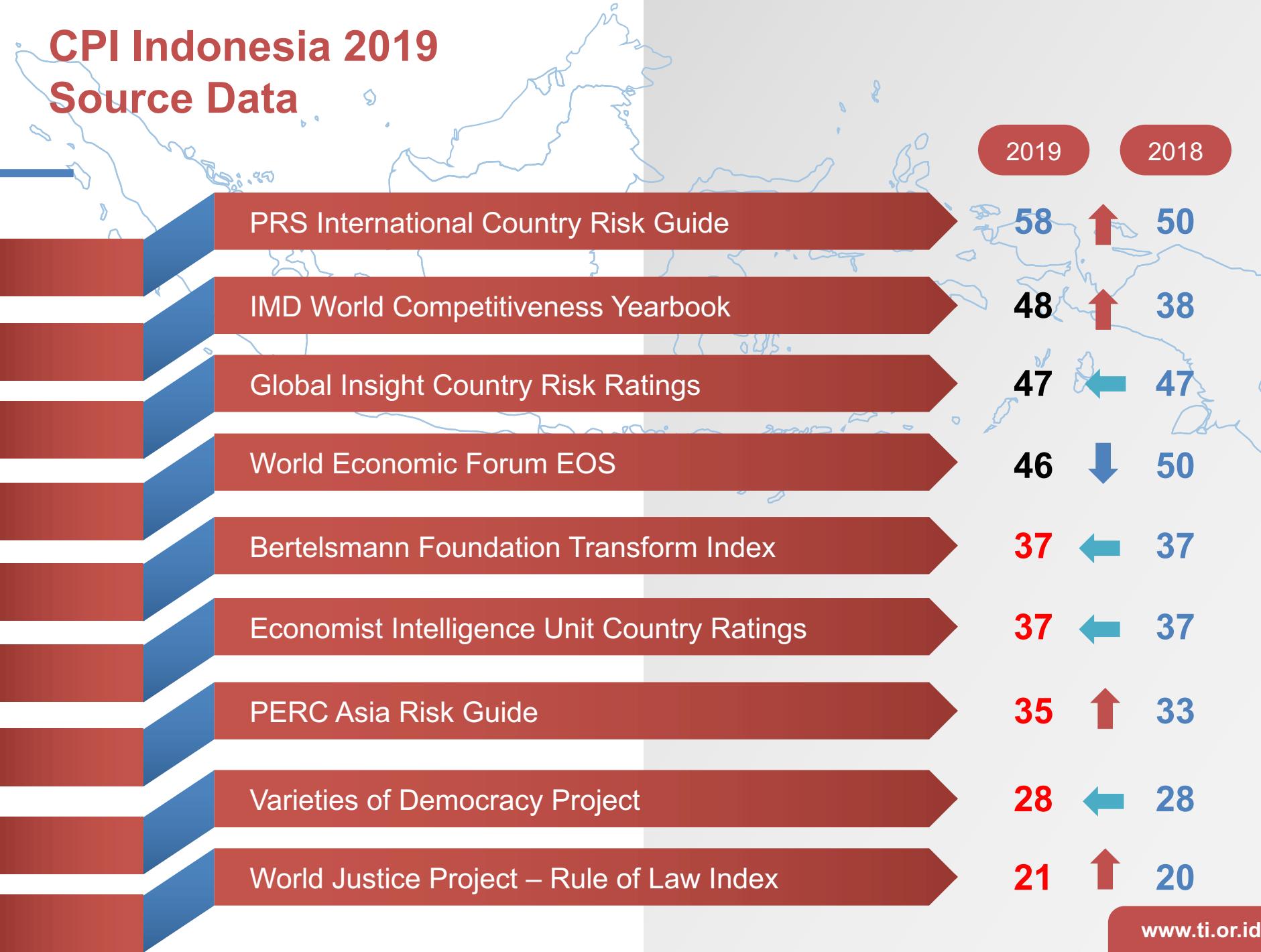
Kenaikan skor yang dibarengi dengan catatan penting karena diujung tahun 2019 telah terjadi pelemahan fondasi dan pilar penting pemberantasan korupsi di Indonesia, yaitu:
KPK dan WARGA YANG KRITIS.

Indonesia CPI Data Dynamics 5 Years



Fokus I: Peningkatan lima skor penyumbang Skor CPI Indonesia yang masih di bawah skor rerata global (43) atau skor rerata ASEAN (46).

CPI Indonesia 2019 Source Data



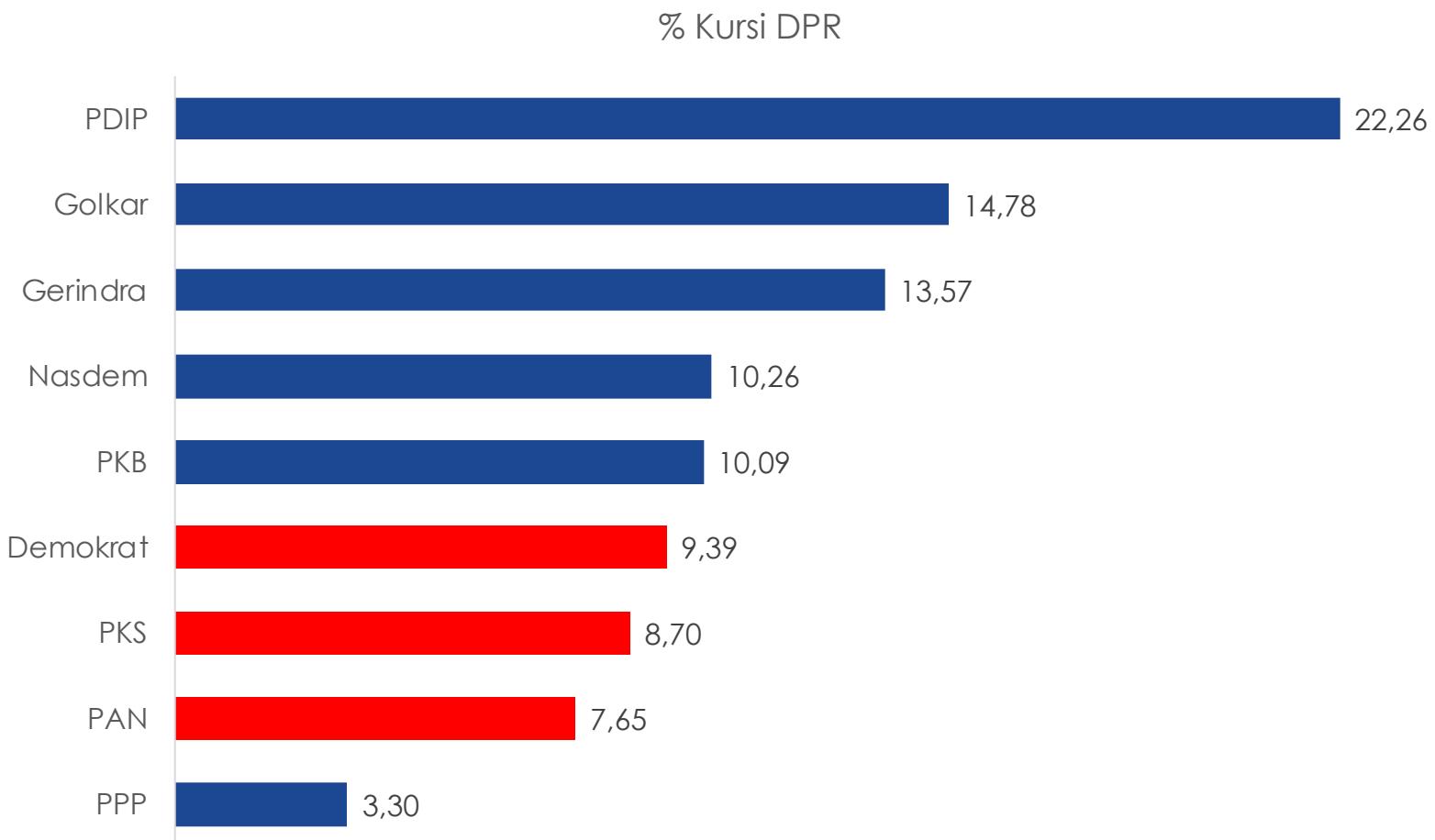
Data Pendukung CPI Indonesia

| | | |
|--|---|---|
| <p><u>WEF - EoS</u></p> <p>Suap & pembayaran ekstra pada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Impor & Ekspor- Pelayanan publik- Pembayaran pajak tahunan- Kontrak dan perizinan- Putusan pengadilan  | <p><u>Political Risk Service</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Korupsi dalam sistem politik- Pembayaran khusus & Suap eksport impor- Hubungan mencurigakan antara politisi & pebisnis  | <p><u>IMD World Competitiveness Yearbook</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Suap dan korupsi dalam sistem politik  |
| <p><u>Bertelsman Foundation Transform Index</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pemberian hukuman pada pejabat publik yg menyalahgunakan kewenangan- Pemerintah mengendalikan korupsi  | <p><u>Economic Intelligence Unit</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur yg jelas & akuntabilitas dana publik- Penyalahgunaan pada sumberdaya publik- Profesionalisme aparatur sipil- Audit independen  | <p><u>Global Insight</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Risiko individu/perusahaan dalam menghadapi praktik korupsi dan suap untuk menjalankan bisnis  |
| <p><u>Political & Economic Risk Consultancy</u></p> <p>Grade korupsi sebuah negara</p>  | <p><u>WJP - Rule Of Law Index</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pejabat di eksekutif, legislatif, yudikatif, kepolisian dan militer menggunakan kewenangannya untuk keuntungan/kepentingan pribadi  | <p><u>Varieties of Democracy</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kedalaman korupsi politik:- Korupsi politik di eksekutif, legislatif dan yudikatif- Korupsi di birokrasi (eselon tertinggi dan kabinet)- Termasuk korupsi besar dan kecil yg mempengaruhi kebijakan publik  |

DISTRIBUSI KURSI DI DPR:

Partai Pendukung Pemerintah : 74%

Partai di Luar Pemerintah : 26%



Quoted from : Faisal Basri

Revisi UU KPK akan **menghambat** pertumbuhan skor CPI ke depan:

- Tanda melemahnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
- Tanda adanya hambatan sistematis terhadap upaya mengadili koruptor (impunitas)
- Tanda melemahnya komitmen pembenahan sistem penegakan hukum → kepastian hukum

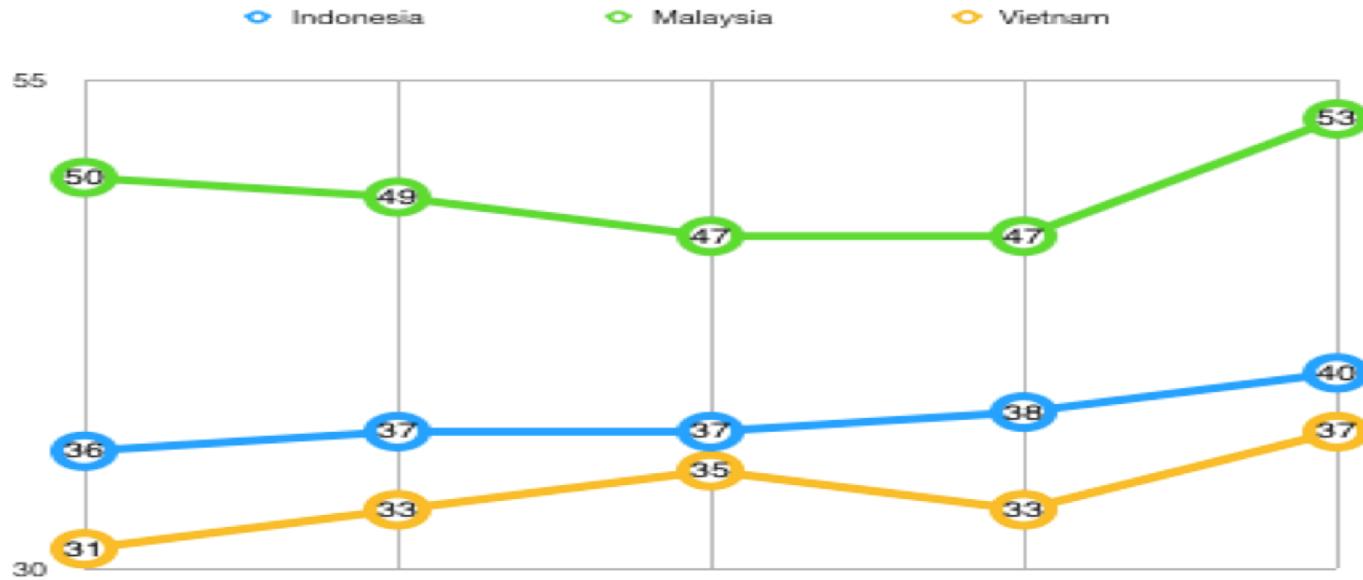


Sumber foto : Dok.KPK

ASEAN CPI 2019

| Rank | CPI 2019 | Country | CPI 2018 | |
|------|----------|-------------------|----------|---|
| 4 | 85 | Singapore | 85 | ↗ |
| 35 | 60 | Brunei Darussalam | 63 | ↘ |
| 51 | 53 | Malaysia | 47 | ↗ |
| 85 | 40 | Indonesia | 38 | ↗ |
| 93 | 38 | Timor Leste | 35 | ↗ |
| 96 | 37 | Vietnam | 33 | ↗ |
| 101 | 36 | Thailand | 36 | ↗ |
| 113 | 34 | Philippines | 36 | ↘ |
| 130 | 29 | Laos | 29 | ↗ |
| 130 | 29 | Myanmar | 29 | ↗ |
| 162 | 20 | Cambodia | 20 | ↗ |

CEK TETANGGA SEBELAH



Pelajaran dari Malaysia :

Faktor Mahathir yang menujukkan komitmen yang kuat dalam memberantas Korupsi, yaitu : Memulihkan kewibawaan MACC dan mengadili Najib yang terlibat dalam skandal korupsi politik 1MDB.

APA YANG HARUS DILAKUKAN KE DEPAN?

- **Memutus rantai impunitas :**
 - Revisi UU No. 19/2019 ttg KPK → kembalikan independensi dan akuntabilitas KPK.
 - Reformasi di lembaga penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas)
 - Modernisasi UU Tipikor dengan adopsi prinsip di UNCAC
- **Efektifkan pelaksanaan Perpres 54/2018 Stranas Pencegahan Korupsi:**
 - Benahi sistem pengadaan barang/jasa, penganggaran.
 - perijinan usaha dan tata-niaga
 - Reformasi birokrasi.
 - Penguatan sistem pencegahan korupsi sektor swasta.

TERIMA KASIH